



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.925, 2013

KEMENTERIAN LUAR NEGERI. Pengawasan
Intern. Perwakilan Republik Indonesia.
Pedoman.

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN INTERN

KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencegah potensi korupsi dan mendorong peningkatan kinerja dan mewujudkan *good governance* di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia dibutuhkan pengendalian dan pengawasan intern yang efektif, kredibel dan transparan;
 - b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam butir a, diperlukan pedoman pelaksanaan pengawasan intern Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pedoman Pengawasan Intern Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Rencana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
 7. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;
 8. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;
 9. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 05 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2001/01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. **Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan Barang Milik Negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.**
2. **Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik**
3. **Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, serta keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.**
4. **Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.**
5. **Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal yang secara fungsional**

melaksanakan pengawasan intern pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Luar Negeri.

6. Satuan Kerja Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disingkat Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Luar Negeri yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
7. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.

Pasal 2

- (1) Maksud pedoman pengawasan intern ini adalah sebagai acuan bagi APIP untuk:
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi APIP; dan
 - b. memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern yang diterapkan oleh masing-masing unit eselon I dan eselon II Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia guna memberikan jaminan kualitas yang memadai atas akuntabilitas kinerja dan anggaran serta mewujudkan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- (2) Tujuan pedoman pengawasan intern adalah untuk:
 - a. mewujudkan capaian kinerja APIP yang berdampak pada peningkatan akuntabilitas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; dan
 - b. memperoleh keyakinan yang memadai atas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Prinsip pengawasan intern adalah:

- a. kemitraan dan konsultasi;
- b. pencegahan melalui mekanisme peringatan dini; dan
- c. penjaminan kualitas yang memadai.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengawasan intern adalah pengujian dan penilaian terhadap:
 - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c. tata kelola sumber daya publik Satuan Kerja;
 - d. pelaksanaan tugas dan fungsi, capaian serta akuntabilitas kinerja Satuan Kerja;
 - e. penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri.
- (2) Materi pengawasan intern mencakup pengawasan tata kelola:
 - a. organisasi dan kelembagaan;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. anggaran;
 - d. Barang Milik Negara dan Aset Negara; dan
 - e. kinerja.
- (3) Pengawasan intern dilaksanakan berdasarkan pedoman/petunjuk pelaksanaan, Standar Operasional Prosedur dan Kode Etik yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN

Pasal 5

- (1) Pimpinan Satker dan Perwakilan bertanggung jawab atas penyelenggaraan:
 - a. akuntabilitas kinerja dan tata kelola sumber daya publik Satker dan Perwakilan; dan
 - b. Sistem Pengendalian Intern di lingkungannya masing-masing.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern.
- (3) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh APIP.
- (4) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pengawasan intern melalui:
 - a. Audit;
 - b. Reviu;